

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PENGGALIAN SUMBER DANA DI LEMBAGA PENDIDIKAN

NURAINI

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
nurainiiaissambas@gmail.com

Abstract

Educational financial management involves the transparent and efficient planning, organising, managing and accounting for funds (RAPBS) to improve the quality of education. Fundraising involves optimising sources from the government (BOS), parents or the community (committees), foundations, and school business units, in order to meet the operational and development needs of educational institutions, namely schools. "Education funding is a shared responsibility between the Government, Local Governments, and the community". Furthermore, Article 2, paragraphs (1) and (2) of Government Regulation No. 48 of 2008 on Education Funding state that education funding is a shared responsibility between the central government, local governments, and the community. The community referred to includes: educational institutions established by the community; students, parents or guardians of students; and other parties besides those mentioned who have an interest and role in the field of education. Development funding, which includes long-term investments to improve the quality of education, such as teacher training, curriculum development, and the construction of learning facilities. 3. Contingency funding, which is allocated for urgent needs or extraordinary events that cannot be planned in advance.

Keywords: *Financial Management, Fundraising. Educational Institutions.*

Abstrak

Manajemen keuangan pendidikan merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana (RAPBS) secara transparan dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penggalan dana melibatkan optimalisasi sumber dari pemerintah (BOS), orang tua atau masyarakat (komite), yayasan, dan unit usaha sekolah, guna memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan yaitu sekolah. pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud meliputi; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain selain yang dimaksud yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pembiayaan pengembangan, yang meliputi investasi jangka panjang untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pembangunan fasilitas belajar 3. Pembiayaan tak terduga, yang dialokasikan untuk keperluan mendesak atau kejadian luar biasa yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan, Penggalan Sumber Dana. Lembaga Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan

dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, karena keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah faktor yang paling penting dalam terlaksananya program yang ada di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang profesional yang baik dan benar yaitu yang dikelola secara efektif dan efisien mungkin sehingga segala proses kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan program yang direncanakan (Amelia Rasyid, 2025: 337).

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen instrumental yang memegang peranan vital dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan seperti sekolah. Sebagai salah satu unsur input yang utama, pembiayaan berfungsi memastikan terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan efektif sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Pendidikan merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan nasional yang berfungsi menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global. Pencapaian tujuan tersebut menuntut terselenggaranya sistem pendidikan yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Salah satu elemen mendasar yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan pembiayaan yang memadai. Tanpa dukungan finansial yang kuat, berbagai komponen Pendidikan meliputi sarana prasarana, kualitas pendidik, kurikulum, proses pembelajaran, serta pengembangan karakter peserta didik tidak dapat berfungsi secara optimal. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa aspek pembiayaan masih menjadi persoalan utama, terutama pada lembaga pendidikan dengan keterbatasan sumber dana, sehingga diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan lembaga (Rahma Dwi Almira, Sasi Herda, Nurlianti, 2025: 44).

Komponen utama manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan yaitu perencanaan keuangan (budgeting) prinsip-prinsip pengelolaan, dan tujuan manajemen keuangan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/ keterampilan. Sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan (1Etty Andtawati: 2025: 123-124).

Mutu pendidikan sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi struktur organisasi secara tepat. Dalam menjalankan roda organisasi lembaga pendidikan membutuhkan pemimpin yang dapat mengefektifkan sumberdaya menjadi sumber kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. (Sukino, 2016) Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan sarana investasi sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci pembangunan ekonomi suatu bangsa (Mujayroh dan Rohmat, 2020:42). Dalam konteks ini, masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sangat mendasar di sekolah atau madrasah. Semua kegiatan pendidikan yang dilakukan di lembaga tersebut sangat terkait erat dengan manajemen keuangan sekolah. Misalnya, dana yang diperoleh harus dialokasikan dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pembelian buku teks, peralatan, dan bahan ajar. Penggajian guru dan staf juga harus terkendali dengan baik. Selain itu, manajemen keuangan sekolah juga melibatkan pengelolaan pendapatan dari sumber-sumber seperti biaya pendaftaran siswa, sumbangan dari masyarakat, atau program kemitraan dengan pihak luar. Namun pada praktiknya masih banyak sekolah maupun madrasah yang belum secara efektif dan efisien mengelola keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis

lembaga pendidikan. Permasalahan dana atau keuangan pendidikan menjadi salah satunya. Tidak semua lembaga pendidikan bisa mengelola keuangan atau dana pendidikan dengan baik, karena sejatinya uang yang dikelola harus disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan standar mutu pendidikan (Dina Puspita Ningsih dan Ahmad Hariadi, 2025, 132-133). Pembahasan tentang manajemen keuangan di lembaga pendidikan selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena menjadi pilar kunci dalam menentukan kualitas pendidikan, sekaligus menjadi area yang penuh dengan dinamika, tantangan, dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, keterbatasan daya sedangkan kebutuhan tinggi, keberlangsungan lembaga, salah sasaran, serta mencari inovasi pendanaan pendidikan. Pengelolaan dana sekolah tidak hanya soal teknik akuntansi melainkan berkaitan langsung dengan kelangsungan operasional dan peningkatan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Definisi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah proses sistem perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawabagn dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan/sekolah tersebut kurang optimal (Siswadi dan Nanik Radiyah, 2024:22).

Menurut Pentingnya Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Depdiknas bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan¹³. Dengan demikian, manajemen keuangan lembaga pendidikan/sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan/sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan paa suatu lembaga pendidikan/sekolah secara garis besar dapat dikelompokan atas tiga sumber, yaitu: • Pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan • Orang tua peserta didik • Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pandanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan , diupayakan pengadaanya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan tujuan manajemen keuangan adalah: • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah • Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah Untuk mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam mengali sumber-sumber dana menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih banyak sekolah maupun madrasah yang belum secara efektif dan efisien mengelola keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengeloaan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan. Permasalahan dana atau keuangan pendidikan menjadi salah satunya. Tidak semua lembaga pendidikan bisa mengelola keuangan

atau dana pendidikan dengan baik, karena sejatinya uang yang dikelola harus disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan standar mutu pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional. 2002).

Manajemen keuangan di lembaga Pendidikan

Upaya pemerintah untuk memberi ruang atas masalah tersebut adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa "pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud meliputi; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain selain yang dimaksud yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia. (2003); 277-287)..

Pembiayaan pendidikan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (accounting), dan tahap penilaian atau evaluasi (auditing). Biaya pendidikan berbentuk uang dan berbentuk biaya kesempatan yang menjadi potensi pendapatan bagi siswa untuk menyelesaikan studinya. Sehingga konsep pembiayaan yang mendasar digolongkan menjadi biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Sumber-sumber pelaksanaan aturan pembiayaan pendidikan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa sumber keuangan sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren yang dilegalkan dan dapat dijadikan sumber pengelolaan satuan pendidikan, antara lain yang didapatkan dari: (i) pemerintah pusat maupun daerah, (ii) yayasan, (iii) masyarakat, (iv) orang tua atau wali dan iuran siswa, (v) alumni, (vi) pengusaha ataupun memanfaatkan potensi usaha dari dana yang ada (wirausaha), serta (vii) donatur dan sumber-sumber lainnya (Anisa Apriyani, Nur Safidah dkk, 2025).

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan 6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang . (Mohamad`Rofiul, manajemen-keuangan-sekolah.html, Diakses 3 dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan (Syarifullah, 2011: 11).

Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut: 1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan. 2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. 3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan 4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil 5. Kegiatan rumah tangga sekolah. (Mohamad`Rofiul, manajemen-keuangansekolah.html, Diakses 3 Juli 2021).

Penggalan sumber dana di lembaga Pendidikan

Seluruh pengalokasian dana harus selalu di evaluasi bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain (Kementrian Pendidikan Nasional 2010).

Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat diuraikan sebagai berikut4 : 1) Dana BOS Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS dibagi menjadi dua yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. 2) Dana BOP PAUD Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Dana BOP dibagi menjadi dua, yaitu BOP reguler dan BOP kinerja. 3) Dana BOP Kesetaraan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Dana APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada pemetaan program prioritas di bidang pendidikan mendapat prioritas ke-4 yaitu Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Prioritas program ini dijabarkan dalam lima kegiatan, yaitu5 : a. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran b. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun c. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Penjaminan Mutu Pendidikan e. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Selaipembiayaan pendidikan dari pemerintah, terdapat pembiayaan pendidikan dari masyarakat (Nurul Hidayah dan Nurfuadi, 2023: 663).

Penjelasan di atas Lebih lanjut menurut Sopiali dalam Mirela Sebagai suatu lembaga pendidikan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa peranan masyarakat maka harus terus melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pendidikan yang ada suatu instansi sekolah termasuk dalam proses pembiayaan pendidikan yang juga melibatkan masyarakat dalam rapat dan menjadikan masyarakat sebagai pengontrol jalannyapendidikan, dengan mengacu pada asas dapaipercaya, jujur, mementingkan keputusan musyawarah, terbuka, disiplin dan lain sebagainya. Pembiayaan pendidikan yang paling populer adalah dari orang tua melalui komite sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berfungsi dalampeningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada pasal3 dijelaskan komite sekolah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya

dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif (Nurul Hidayah dan Nurfuadi, 2023:664).

Sejalan dengan penjelasan di atas Pembiayaan sekolah adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan dana serta kemampuan sekolah dalam mengelola anggaran atau pendapatan serta belanja pendidikan. Manajemen keuangan sekolah berperan besar terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses perencanaan yang baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. pembiayaan juga harus mempertimbangkan sifat efektif dan efisiensi secara maksimal dan tidak menyalahi dari tujuan pembiayaan yaitu; demi tercapainya keberhasilan pendidikan (Bashori, Dwi Adinda Putri, 2022: 55). Sumber pembiayaan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori pokok, yaitu: a. Dana dari penerimaan umum pemerintah, yang menjadi pilar utama pendanaan pendidikan dan mencakup pendapatan negara di seluruh jenjang pemerintahan, termasuk pajak, bantuan internasional, dan pinjaman. Besaran dana ditentukan oleh pemerintah berdasarkan prioritas kebijakan yang berlaku. b. Penerimaan khusus sektor pendidikan, berupa bantuan atau pinjaman luar negeri yang secara khusus diarahkan untuk keperluan pendidikan, misalnya melalui dukungan dari UNICEF atau UNESCO, serta pajak khusus yang dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk pendidikan. c. Iuran pendidikan atau uang sekolah, yaitu kontribusi langsung orang tua peserta didik sesuai kebijakan yang disepakati bersama. d. Sumbangan sukarela, berupa dukungan dari masyarakat, individu, atau lembaga lain dalam bentuk uang, barang, jasa, atau kegiatan penggalangan dana yang tidak mengikat. Selain itu, sekolah swasta juga memperoleh dukungan dari pemerintah melalui berbagai bentuk bantuan, seperti penempatan guru negeri, bantuan pembangunan gedung serta pengadaan peralatan, dan bantuan operasional rutin. Bantuan tersebut dapat berupa sumbangan, bantuan khusus, atau subsidi. Sumbangan umumnya bersifat insidental untuk menutupi sebagian kebutuhan rutin; bantuan diberikan berdasarkan jumlah peserta didik; sementara subsidi ditujukan untuk memenuhi keseluruhan biaya operasional sekolah. Menurut Sagala pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1. Pembiayaan rutin, yang mencakup kebutuhan operasional harian seperti gaji guru, listrik, air, dan perlengkapan sekolah 2. Pembiayaan pengembangan, yang meliputi investasi jangka panjang untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pembangunan fasilitas belajar 3. Pembiayaan tak terduga, yang dialokasikan untuk keperluan mendesak atau kejadian luar biasa yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Rahma Dwi Almira, Sasi Herda, Nurlianti, 2025:48).

Defisit dan Surplus di Lembaga Pendidikan

Pembiayaan dalam pendidikan terbagi atas beberapa jenis yaitu : Biaya langsung (Direct Cost) Biaya langsung atau disebut juga dengan direct cost yaitu sebuah pemakaian dana untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, research serta pengabdian terhadap masyarakat. Biaya ini secara langsung membiayai semua komponen dalam kegiatan pendidikan (Sudarmono & Lias Hasibuan, 2021). Contoh dari biaya langsung yaitu anggaran akan gaji pendidik dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi alat pembelajaran, sarana pembelajaran, dan biaya transportasi. Biaya langsung terdiri atas biaya rutin (recurrent cost) yang mendanai operasional sekolah dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan program pembelajaran. Contohh dari biaya ini yaitu untuk pembayaran gaji pendidik, anggota sekolah, administrator, serta untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Adapun komponen-komponen yang ada dalam pembiayaan pendidikan yaitu: a) meningkatkan KBM b) meningkatkan pembinaan kegiatan siswa, c) pembinaan tenaga kependidikan d) rumah tangga sekolah e) pengadaan alat-alat belajar, f) kesejahteraan, g) pengadaan bahan pelajaran h) perawatan sarana kelas j) pengadaan alat-alat belajar, k) sarana sekolah, l) pembinaan tenaga kependidikan m) pembinaan siswa, n) pengadaan bahan pelajaran, o) pengelolaan sekolah, p) pemeliharaan dan penggantian sarana dan

prasarana pendidikan, q) biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, r) peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, s) peningkatan kemampuan dalam menguasai IPTEK (Sudarmono & Lias Hasibuan, 2021).

Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) Biaya tidak langsung (indirect cost) ditanggung oleh peserta didik dan orangtua atau orang yang menanggung biaya pendidikan siswa tersebut (Masditou, 2017) Jenis biaya ini terbagi dua, antara lain: a) Biaya pribadi (private cost) yang dibayarkan oleh keluarga peserta didik untuk membayarkan biaya operasional sekolah anaknya yang dikeluarkan secara individu, b) Biaya masyarakat (social cost), merupakan biaya yang diperoleh dari masyarakat untuk memenuhi berbagai kepentingan sekolah (termasuk juga biaya pribadi). Monetary Cost Monetary cost adalah pengeluaran yang berbentuk uang baik yang digunakan secara langsung dan tidak langsung untuk memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan pendidikan (Sudarmono & Lias Hasibuan, 2021). Non-Monetary Cost Non monetary cost adalah jenis biaya berbentuk non uang yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan dan digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan kegiatan pendidikan. Contoh dari biaya ini yaitu waktu, tenaga, dan lain sebagainya (Sudarmono & Lias Hasibuan, 2021).

Penjelasan Dalam buku Organisasi Dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan bahwa pembangunan bangsa harus dibiayai terutama dari dana dalam negeri serta ketentuan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Negara, masyarakat dan orang tua, maka secara garis besar biaya pendidikan bersumber dari empat arah, yaitu: (1) dari pemerintah meliputi kurang lebih 70% (2) dari orang tua murid meliputi kurang lebih 10-24% (3) dari masyarakat meliputi kurang lebih 5%, (4) dari bantuan atau pinjaman luar negeri meliputi kurang lebih 1% (1E. Mulyasa, 2002: 478).

Menurut Indra Bastian, bahwa selama ini sekolah-sekolah hanya memiliki laporan-laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi keuangan sekolah. Diharapkan sekolah memiliki laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri atas neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap siswa dalam tiap bulan, semester dan tahunnya (Indra Bastian, 2007: 160).

PENUTUP

Manajemen keuangan pendidikan merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana (RAPBS) secara transparan dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penggalan dana melibatkan optimalisasi sumber dari pemerintah (BOS), orang tua atau masyarakat (komite), yayasan, dan unit usaha sekolah, guna memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan yaitu sekolah. Langkah strategis yang perlu dimaksimalkan adalah memperkuat kerjasama dengan alumni, mengaktifkan unit usaha atau bisnis milik sekolah, serta mengajukan proposal kepada pihak swasta dan perusahazan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Rasyid1* ,Hamdi Abdul Karim2, Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Lembaga Pendidikan di SD Negeri 17 Cegek, Received: April 14, 2025; Revised: Mei 19, 2025; Accepted: Juni 16, 2025; Published: Juni 23, 2025, hlm. 337.
- Anisa Apriyani, Nur Safidah, Sariayana, Awilisni, Nurul Hidayati Murtafiah
- Bashori, Dwi Adinda Putri, Hubungan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Terhadap Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembelajaran, Jurnal Prajaiswara, Volume 3 Nomor 1Mounth June Year 2022. Hlm.55.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.

- Dina Puspita Ningsih dan Ahmad Hariadi, Manajemen Keuangan Sekolah di MI Darul Hikmah Entalsewu Sidoarjo, *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, Volume 3, Nomor 2, April 2025. Hlm. 132-133.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 478
- Etty Andtawati, "Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan" *UNS Surakarta* 6, no. 1 (2018): 123-124.
- Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 2007), 160.
- Mohamad'Rofiul, manajemen-keuangansekolah.html, Diakses 3 Juli 2021. Kementerian Pendidikan Nasional (2010). *Instrument Dokumen Portofolio*, Jakarta.
- Mujayaroh dan Rohmat, *Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan*, *Arfannur Journal of Islamic Education*, Volume. 1, nomor 1 2020. Hlm. 42.
- Nurul Hidayah dan Nurfuadi, Penggalan Sumber Dana Pendidikan, *EduCurio Jurnal*, Vol. 1, Nomor. 2 March 2023, hlm. 663-664.
- Rahma Dwi Almira, Sasi Herda, Nurlianti, *Trategi Penggalan Sumber Dana Dalam Meningkatkan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*, *AL-AFKAR: Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025, hlm.44.
- Rahma Dwi Almira, Sasi Herda, Nurlianti, *Trategi Penggalan Sumber Dana Dalam Meningkatkan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*, *AL-AFKAR: Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025, hlm. 48.
- Siswadi dan Nanik Rudiyah, *Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan*, Vol.04 No. 01 (April 2024 *Al-Maqashid*, hlm. 22.
- Sudarmono, & Lias Hasibuan, K. A. U. (2021). *Pembiayaan Pendidikan*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Syaifullah, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, *Journal of Pedagogy*, Volume 4. Number 1, 2021, hlm.11-17.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. *Pustaka Pelajar*. *Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Unisan Jurnal, Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, Vol. 01 No. 03 (2022), hlm. 277-287.